

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SELAYAR
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang:**
- a. bahwa Program Pembangunan Daerah merupakan suatu arahan dan pedoman di dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah, baik bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Propinsi di Daerah maupun masyarakat pada umumnya;
 - b. bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Nasional, Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan merupakan suatu komitmen dalam melaksanakan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan spesifik daerah dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan makro Nasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar.

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3501);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor Kep. 010/ K/ 01/ 1999 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Tanggung Jawab Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SELAYAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Selayar;

- c. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Selayar;
- d. Program Pembangunan Daerah adalah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar;

Pasal 2

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, maka sistematika Program Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar disusun sebagai berikut:

- BAB I UMUM
- BAB II PENINGKATAN KUALITAS SUSAABER DAYAMANUSIA
- BAB III PENGEAABANGAN KELEAABAGAAN PEMERINTAH DAN AAASYARAKAT
- BAB IV PENGUATAN KETAHANAN EKONOAAI DAERAH
- BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdapat dalam naskah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Daerah untuk mengembang dan melaksanakan Pasal 2 dengan menjabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 3, Kepala Daerah memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan yang digariskan dalam Naskah Program

Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar sebagai pedoman dan arahan kegiatan pembangunan utamanya dalam penentuan alokasi anggaran yang dilakukan setiap tahun.

Pasal 6

Setiap lima tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Program Pembangunan Nasional, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Selayar.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

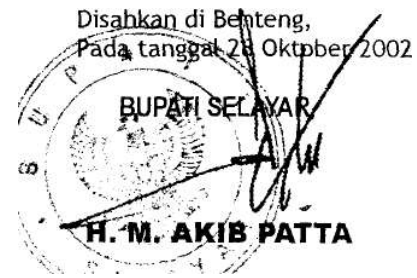
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Diundangkan di Benteng Pada Tanggal 28 Oktober

Disahkan di Benteng,
Pada tanggal 28 Oktober 2002



BUPATI SELAYAR
H. M. AKIB PATTA

2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEUYAR,



Drs. H. A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEUYAR TAHUN 2002

NOMOR 24

BAB I UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi menyebabkan terjadinya pergeseran pola perencanaan pembangunan nasional dan daerah dari format rencana jangka panjang (*long range planning*) menjadi pola rencana strategik (*strategic planning*). Pergeseran tersebut di samping dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan dengan laju yang semakin cepat, juga merupakan bagian dari pergeseran pendekatan pembangunan yang berciri sentralistis menuju ke pendekatan yang desentralistis.

Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang merupakan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan perwujudan dari pola perencanaan strategik. Propeda memuat rumusan program-program pembangunan yang mendasar, sebagai alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek.

Propeda Kabupaten Selayar disusun dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2005, Garis-garis Besar Haluan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan serta Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar tahun 2002-2006.

Propeda Kabupaten Selayar merupakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta dan unsur-unsur atau kelompok masyarakat lainnya. Di samping itu, Propeda ini juga harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Selayar. Dengan demikian, Propeda akan menjadi acuan

dalam perumusan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Daerah yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Selayar.

1.2. KONDISIUMUM

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Propenas tahun 2001 2005 dijelaskan lima kategori permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesiasaat ini, antara lain: (1) meningkatnya gejala desintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial; (2) lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;(3) lambatnya pemulihan ekonomi; (4) rendahnya kesejahteraan rakyat dan lemahnya ketahanan budaya nasional; dan (5) kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.

Permasalahan nasional tersebut tentunya juga merupakan bagian dari permasalahan di daerah Kabupaten Selayar, ditambah dengan permasalahan khusus daerah sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

1.2.1 Rendahnya Kualitas SDM.

a. Pendidikan.

Berdasarkan hasil sensus, penduduk Selayar tahun 2000 berjumlah 103.473 jiwa. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1999 berjumlah 100.402 jiwa terlihat pertumbuhan sekitar 3.071 jiwa, atau sekitar 2,97 % pertahun. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Selayar periode 1990 1999 sekitar 1,45% pertahun.

Ditinjau dari kelompok umur, terlihat bahwa partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7 12 tahun sebesar 13.745 orang dan yang tertampung saat ini, sebesar 12.749 orang. Hal ini berarti, sebanyak 996 orang yang tidak tertampung, atau sekitar 7,25 %. Sementara angka partisipasi sekolah usia 13 15 tahun sebanyak 6.673 orang dan tertampung sebanyak 3.650 orang, sebanyak 3.023 or belum tertampung

atau sekitar 45,30 %. Sementara itu, angka partisipatif sekolah usia 16 – 18 tahun sebesar 5.461 orang dan yang tertampung set 1.607 orang. Berarti sebanyak 3.854 orang belum tertampung atau sekitar 70,57 %. Dari data tersebut tergambar bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi sekolahnya.

Untuk mengurangi angka partisipasi sekolah yang tidak tertampung di setiap jenjang pendidikan, telah ditempuh berbagai upaya antara lain penyelenggaraan program Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SLTP) dimana untuk tahun ajaran 2001 kedua paket tersebut masing-masing menampung sebanyak 11.695 orang dan 4.119 orang disamping itu, kepada anak sekolah yang tidak atau belum tertampung di tingkat SLTP, diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya pada SMP terbuka yang ada di sets kecamatan. Sampai dengan tahun ajaran 2001, jumlah partisipasi sekolah yang tertampung pada SMP terbuka sebanyak 263 orang.

Berdasarkan data statistik, tahun 2000, Penduduk Kabupaten Selayar usia tahun ke atas berjumlah 81.436 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang dapat membaca dan menulis berjumlah 70.182 atau sekitar 86,18 %, berarti terdapat 11.524 orang atau sekitar 13,82 % penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis.

Kemajuan tingkat pendidikan berdasarkan data statistik dilihat pendidikan SD yaitu setiap Guru SD menangani sekitar 12 murid; pada tme SLTP setiap Guru menangani 10 murid; dan tingkat SLTA setiap Guru menangani 12 murid. Demikian halnya rasio murid sekolah pada tingkat SD yaitu rata-rata

setiap SD mempunyai sekitar 83 murid, tingkat SLTP ratio yaitu setiap sekolah mempunyai 141 murid, dan tingkat SLTA mempunyai ratio sekolah 295 siswa.

Melihat ratio guru dan murid, serta rasio murid sekolah pada semua tingkatan pendidikan di atas, menggambarkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai, hanya saja Kabupaten Selayar yang terdiri atas wilayah-wilayah kepulauan, maka penyebaran tenaga pendidik (guru) belum merata ketersediaannya jika membandingkan antara daratan pulau Selayar, dan pulau-pulau yang tersebar sampai ke perbatasan wilayah NTT.

b. Kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini harus didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara mudah, murah, dan merata.

Di Kabupaten Selayar hingga tahun 2000 jumlah Rumah Sakit 1 (satu) buah; Puskesmas 9 buah yang berarti ratio Puskesmas terhadap penduduk tahun 2000 adalah 0,86 per 10.000 penduduk, Pustu sebanyak 40 buah, Puskesmas Keliling 13 buah yang terdiri dari: 9 buah kendaraan roda empat dan 4 buah Puskesmas Keliling perahu motor, Posyandu 160 buah, dan Pos UKK 12 buah.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat adalah terpenuhinya tenaga kesehatan yang memadai, dalam artian rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk sedapat mungkin diperkecil. Tenaga kesehatan di Kabupaten Selayar

berjumlah 227 orang yang terdiri dari Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Para Medis, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kesehatan lainnya yakni: Sanitarian, Pembantu Perawat, dan SPRG (Sekolah Pengatur rawat Gigi).

Angka kematian bayi di Kabupaten Selayar tahun 2000 adalah 21,07 perseribu kelahiran, dan angka kematian ibu bersalin adalah 2,51 perseribu kelahiran. Demikian halnya angka kematian kasar adalah 0,9 perseribu penduduk, dan **angka harapan hidup** adalah 61 tahun, tertinggi pada Kecamatan Bontoharu 65 **tahun dan terendah** Kecamatan Pasimarannu 57 tahun.

Kendala **utama pelayanan** kesehatan di Kabupaten Selayar adalah belum tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai khususnya bagi pasien yang membutuhkan pelayanan standar, dan terhadap penderita penyakit yang mengharuskan pengobatan intensif. Beberapa kejadian, penderita yang dirujuk dari Rumah Sakit Selayar ke Rumah Sakit di i tidak tertolong, karena waktu tempuh yang cukup lama dan sarana 1 yang tidak tersedia setiap saat.

c. Aparatur.

Untuk kelancaran dan pemerataan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka Kabupaten Selayar yang wilayahnya terdiri atas pula membutuhkan ketersediaan aparatur birokrasi yang seharusnya standar dari kabupaten yang wilayahnya terdiri atas wilayah daratan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2001 Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan I

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Selayar Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 tahun 2001 Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar, maka jumlah instansi kerja pada Pemerintah Kabupaten Selayar terdiri atas 2 (dua) Sekretariat (enam) Badan, 10 (sepuluh) Dinas, 3 (tiga) Kantor (termasuk RSUD Selayar), 9 (sembilan) Kecamatan, dan 7 (tujuh) Kelurahan.

Dari struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Selayar tersebut formasi jabatan yang tersedia yaitu : eselon II A 1(satu) orang; eselon II B 21 eselon IIIA 83 orang; eselon III B 9 orang; eselon IV A 283 orang; dan < B 28 orang.

Berdasarkan formasi jabatan yang tersedia di atas, telah terisi (*bezetting*) orang eselon II A, 10 orang eselon II B, 37 orang eselon III A, 9 orang eselon IIIB, 180 orang eselon IV A dan 21 orang eselon IV B.

Sementara konstruksi pegawai menurut golongan terdiri dari : Golongan IV 94 orang; golongan III 810 orang; golongan II 547 orang; dan golongan I 51 Orang. Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yaitu: Strata II (S2) 2 Orang (Strata Satu (S1) 326 orang; Diploma Empat (D4) 51 orang; Diploma Tiga (D3) orang; SLTA 590 orang; SLTP 118 orang, dan SD 50 orang. Berdasarkan Diklat Struktural terdiri dari : ADUM 148 orang; ADUAMLA 48 orang; SPAMA 67 Orang dan SPAMEN 9 orang.

Sebagaimana pemaparan di atas, maka ditinjau dari segi kuantitas, terlihat bahwa aparatur Pemerintah Kabupaten Selayar masih kurang. Perbandingan ideal (ukuran pada wilayah daratan) antara jumlah pegawai

dan jumlah penduduk yang harus dilayani adalah 1:38, atau dengan perkataan lain 1 (satu) orang pegawai, maksimal melayani 38 orang penduduk. Melihat jumlah penduduk kabupaten Selayar sebanyak 103.473 orang, dengan jumlah pegawai sebanyak 2.606 orang, berarti secara kuantitas masih kekurangan pegawai sekitar 117 orang. Kondisi tersebut belum diperhadapkan dengan bentuk wilayah, yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan, yang tentu saja membutuhkan pegawai lebih, dibanding dengan wilayah daratan, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, dan tugas umum pemerintahan.

Untuk menggambarkan kekurangan pegawai pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Selayar lebih jauh, dapat digambarkan sebagai salah satu perbandingan yaitu Kantor Bappelitbangda, dengan struktur yang ada sekarang membutuhkan sekitar 84 orang pegawai baik pejabat struktural, fungsional, dan staf, sedangkan pegawai yang ditempatkan baru sekitar 23 orang. Gambaran pegawai pada Kantor Bappelitbangda tersebut, juga terjadi pada unit kerja lain, baik Badan, Dinas, Kantor bahkan sampai kepada Kantor Kecamatan, Kelurahan, dan lingkungan.

Kekurangan pegawai tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas, terutama sangat dirasakan pada instansi/unit kerja yang membutuhkan keahlian khusus, seperti tenaga teknik pada Dinas Kimprasda, tenaga ahli bidang kepariwisataan pada Dinas Pariwisata, dan tenaga ahli bidang perikanan serta tenaga ahli bidang kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Demikian halnya pada unit-unit kerja tertentu, sangat membutuhkan tenaga-tenaga

fungsional tetapi belum tersedia secara memadai, padahal sangat dibutuhkan khususnya dalam menghadapi tantangan otonomi daerah dan era globalisasi.

1.2.2 Lemahnya Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

Pendekatan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, dengan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terpusat, yang lebih dipersulit dengan sistem penyeragaman, mengakibatkan kelembagaan pemerintah di daerah kurang berkembang. Dokumen perencanaan yang disusun kurang mengakomodir kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat, karena umumnya hanya mengikuti kehendak pemerintahan pusat.

Kelemahan ini menjadi semakin nyata jika dikaitkan dengan kualitas aparat, **kredibilitas** aparatur pemerintah di mata masyarakat yang turun mendekati titik nadir, merupakan **salah** satu kendala dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan **dan** pembangunan.

Kondisi di atas semakin diperparah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga kurang menghargai tatanan adat budaya di dalam masyarakat. Konsep politik massa mengambang (*floating mass*) mengakibatkan posisi pemimpin tradisional/informal kurang dihargai, Kepala Desa diposisikan sebagai aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta menyukseskan program-program pemerintah.

Terjadinya pergeseran peran dan kewenangan dari pemerintah pemerintah daerah sejalan dengan lahirnya

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peran dan tanggung jawab aparat pemerintah daerah akan menjadi dominan, dan lebih dari itu perubahan paradigma pemerintahan menyebabkan pemerintah berubah dan atau harus mampu menyesuaikan diri dari pelaku menjadi fasilitator.

Kelemahan disektor pemerintah tersebut di atas, lebih jauh berdampak terhadap kondisi lembaga-lembaga masyarakat diberbagai bidang. Secara umum lembaga-lembaga masyarakat sebagai warisan masa lalu tidak memiliki kemandirian untuk melaksanakan tugas dan misinya. Hampir semua organisasi sosial politik menghadapi kendala pembiayaan, sehingga harus menunggu uluran tangan pemerintah. Kondisi demikian berakibat Orsospol tidak mandiri, sehingga fungsi-fungsi Orsospol sebagai lembaga pengkaderan, penyalur dan pengartikulasi masyarakat terabaikan.

Lembaga-lembaga di bidang ekonomi juga memperlihatkan kecenderungan yang sama. Koperasi yang telah mendapat perhatian dan posisi pendanaan yang cukup besar dari pemerintah tidak berkembang dan atau melaksanakan misinya sebagai lembaga ekonomi yang handal, akibat campur tangan pemerintah sampai ke hal-hal yang bersifat teknis sehingga mengabaikan tugas-tugas pemberdayaan bagi pengurus dan anggotanya.

Jika ditelusuri, kelemahan dari berbagai lembaga kemasyarakatan, juga tidak terlepas dari sistem pemerintahan desa sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan berbagai aturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Desa dimaksud dan kuatnya sistem politik massa mengembang maka lembaga-lembaga tradisional yang hidup dan terpelihara di masyarakat secara turung temurun,

digantikan dengan lembaga-lembaga baru yang hampir secara keseluruhan diketuai oleh Kepala Desa. Akibatnya, lembaga tradisional menjadi punah, sementara lembaga baru tidak mampu berperan secara optimal, karena tidak mendapat dukungan yang signifikan dari masyarakat.

Lemahnya kelembagaan pemerintah ditandai dengan masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, distribusi hasil-hasil pembangunan yang belum merata, saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi

mereka belum berjalan lancar. Sebagai akibat dari semua itu, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah merupakan sesuatu yang senantiasa dirasakan.

Di samping kualitas aparat pemerintah daerah, struktur pemerintahan juga tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Pergeseran peran dan kewenangan yang disebutkan sebelumnya, membutuhkan struktur pemerintahan yang pada satu sisi harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang relatif lebih luas

Kelemahan di sektor pemerintah yang disebutkan di atas, lebih diperparah dengan kondisi lembaga-lembaga masyarakat pada berbagai bidang. Lembaga masyarakat pada umumnya tidak memiliki kemandirian untuk melaksanakan misinya. Hampir semua organisasi sosial politik menghadapi kendala langkanya sumber-sumber pembiayaan kegiatan organisasinya. Hal ini terjadi, karena pada era orde baru, organisasi-organisasi tersebut pada umumnya menggantungkan kebutuhannya kepada bantuan pemerintah.

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap terjadinya pergeseran paradigma pembangunan dari *sentralisasi* ke *desentralisasi*, dan menyebabkan peran pemerintah berubah dari sebagai *pelaku utama* menjadi *fasilitator*.

Pergeseran peran, kewenangan dan tanggung jawab tersebut menuntut upaya yang serius untuk mengembangkan baik kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat sesuai dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah.

1.2.3 Perikanan dan Kelautan.

Kabupaten selayar yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, sebahagian besar wilayahnya belum banyak tersentuh oleh kegiatan pembangunan secara

terstruktur dan terintegrasi, sehingga pemanfaatan potensi wilayah utamanya potensi perikanan dan potensi kelautan belum optimal.

Beberapa hal yang mendasari hal di atas yakni: (1) Selama ini pembangunan daerah Kabupaten Selayar masih di dominasi oleh arahan dan kepentingan pembangunan skala propinsi dan skala national. Adanya penentuan batas dari garis pantai yang akan dikelola oleh propinsi dan nasional, menyebabkan Kabupaten Selayar tidak dapat mengintegrasikan pembangunan wilayahnya secara mandiri; (2) Kabupaten Selayar yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan besar, menyebabkan sehingga sulit mengintegrasikan pembangunan antara satu pulau dengan pulau lainnya; (3) Sarana dan prasarana perhubungan antar wilayah pulau, maupun sarana perhubungan dengan daerah-daerah lain, belum cukup memadai sehingga pengelolaan pembangunan kurang optimal; (4) Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan potensi laut dan perikanan, merupakan jenis usaha yang memerlukan investasi sehingga masih terbatas pengusaha-pengusaha yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Selayar.

1.2.4. Potensi Pariwisata Yang Belum Dikembangkan

Sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi dan peluang usaha yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Selayar, sektor pariwisata merupakan salah satu produk unggulan komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis obyek wisata yang memiliki daya tarik bagi untuk berkunjung ke daerah ini, yaitu: (a) wisata alam (air terjun dan pant putih); (b) wisata bahari (Taka Bonerate); dan (c) wisata budaya (Gong Nekara, meriam Kuno dan Jangkar Raksasa).

Namun demikian, dari tiga jenis obyek wisata yang

menjadi daya tarik utama tersebut, terdapat sejumlah masalah yang cukup berat dalam pengembangannya, terutama keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur par termasuk alat transportasi baik darat, laut maupun udara.

Apabila potensi sektor pariwisata dimanfaatkan secara optimal, maka sektor ini dapat memegang peranan penting dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Selayar. Tidak hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapat kapita masyarakat.

Di samping itu, pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata memberikan pengaruh yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya untuk tumbuh dan berkembang.

1.3 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

Kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Selayar yang dirumuskan dalam Dasar Pembangunan Daerah, yaitu berupa Visi dan Misi serta strategi pembangunan daerah yang dijabarkan sebagai berikut.

1.3.1. Visi, Misi dan Nilai

Dalam Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar tahun 2006 dirumuskan Visi Kabupaten Selayar sebagai berikut:

*'Terwujudnya Selayar sebagai Kabupaten Maritim
yang Mapan, Mandiri dan
Berkelanjutan'*

Visi tersebut di atas mengandung empat kata kunci yang menggambarkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kabupaten Selayar sebagai berikut:

1. *Sebagai Kabupaten Maritim*, merupakan penegasan dari

- aspirasi dan cita-cita masyarakat dan pemerintah Kabupaten Selayar untuk mendapatkan kewenangan sepenuhnya serta mengoptimalkan segala potensi sumberdaya alam dan sumberdaya kelautan untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. *Mapan*, merupakan suatu kondisi di mana daerah mempunyai kemampuan yang dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai daerah otonom serta tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat.
 3. *Mandiri*, merupakan kondisi di mana daerah telah mampu mengelola/memanfaatkan potensi sumber dayanya secara optimal melalui penguasaan berbagai teknologi yang diperlukan tanpa ketergantungan dan membuka diri dengan pihak luar dalam kerangka kemitraan.
 4. *Berkelanjutan*, merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan menekankan kepada pertimbangan kelestariannya, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara terus menerus.
 5. *Mapan-Mandiri* merupakan akronim dari *Menata Arah Masa Depan Masyarakat Adil dan Makmur di Bawah Ridho Ilahi*, yang merupakan motto kabupaten Selayar yang telah ditetapkan melalui Perda No.3 Tahun 1996, pasal 3.

Sejalan dengan misi negara yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 dan misi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Garis-garis Besar Pembangunan Daerah Propinsi (GBHD) Sulawesi Selatan, serta memperhatikan kondisi obyektif, tahapan perkembangan yang telah dicapai dan prospek pengembangannya ke depan, maka Misi Kabupaten Selayar dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh.

2. Menciptakan transformasi budaya dari budaya masyarakat agraris/kontinen kebudayaan masyarakat bahari.
3. Menjadikan Selayar sebagai pusat distribusi perikanan.
4. Menjadikan Selayar sebagai bagian dari paket Nasional Obyek dan Daya Tank Wisata (ODTW)
5. Mewujudkan Selayar sebagai bagian dari sistem transformasi Nasional, baik darat, laut maupun udara.
6. Menjadikan Selayar sebagai pendukung utama perekonomian Sulawesi Selatan menuju propinsi terkemuka di bidang kelautan.

Selanjutnya nilai-nilai yang diangkat dan dikembangkan dari budaya tradisional masyarakat sesungguhnya dapat berfungsi sebagai rambu-rambu, norma, dan penuntun dalam menjalankan berbagai dimensi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat. Namun nilai-nilai tersebut harus dikombinasikan dengan cara pandang yang dianut global, bukan hanya untuk turut memperkaya nilai-nilai budaya tradisional lokal, akan tetapi untuk menghindari pandangan dan paham yang sempit. Nilai akan memotivasi setiap orang untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang lain.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. ***Tappa' ri-Alla Ta' ala***, artinya yakin dan percaya kepada Allah SWT, terwujud pada setiap tindakan, perkataan, dan perbuatan.
2. ***Kontu tojeng***, artinya konsisten dalam pencapaian cita-cita dan tujuan yang direncanakan dan disepakati bersama.
3. ***Passamaturukang***, artinya komitmen yang telah menjadi kesepakatan harus dilaksanakan dan diraih secara bersama.

4. *Siri*, artinya setiap orang akan merasa malu jika tidak bisa berperilaku, dan memperoleh hasil yang baik seperti yang dilakukan orang lain, dan malu berbuat kebohongan, tidak jujur, dan melanggar aturan agama, pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
5. *Assipakatau*, artinya saling menghargai dan saling menghormati.
6. *Berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan*. Nilai keagamaan akan berperan sebagai norma dan penuntun dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, baik pemerintah, swasta, pemerintah maupun seluruh masyarakat.

1.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Selayar yang telah ditetapkan dalam Dasar Pembangunan Daerah, maka dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan Kabupaten Selayar akan memperhatikan arah kebijakan masing bidang sebagai berikut:

1. Pembangunan **bidang pekerjaan umum** diarahkan pada pembangunan pra dan sarana dasar yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan bidang-bidang strategis dan sektor-sektor andalan dan mendukung mobilitas produksi dan faktor-faktor produksi serta faktor-faktor pendukung lainnya, baik lokal, antar daerah (regional), nasional maupun internasional.
2. Pembangunan **bidang kesehatan** diarahkan pada pengembangan sistem **pelayanan** kesehatan masyarakat yang mampu meningkatkan dan memperluas peran masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesehatan terorganisasi sebagai kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan,

peningkatan kualitas luaran sekolah, angkatan kerja dan masyarakat pada umumnya dalam rangka penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan, memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi tuntutan dunia kerja dan kebutuhan pembangunan pada umumnya. Di samping itu, pembangunan sektor kebudayaan diarahkan pada pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan lokal dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai budayanya. Pembinaan potensi budaya lokal tersebut, pada akhirnya akan menjadi daya tarik pariwisata.

4. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dengan mengembangkan pola hubungan dan keterkaitan yang serasi antara aspek produksi, faktor produksi, pemasaran dan kelembagaan.
5. Pembangunan bidang perikanan dan kelautan diarahkan untuk menjadi sumber penggerak utama pembangunan ekonomi Kabupaten Selayar melalui pemberdayaan segenap potensi sosial ekonomi masyarakat dan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber daya kelautan.
6. Pembangunan bidang perhubungan diarahkan untuk menunjang kehidupan ekonomi daerah sekaligus penggerak dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa serta menentukan pola distribusi dan sekaligus sebagai instrumen untuk membuka keterisolasian daerah.
7. Pembangunan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada: (1) Pengembangan usaha-usaha industri yang memiliki keterkaitan kuat dan saling mendukung antar sektor, terutama sektor produksi

yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas; (2) Peningkatan dan perluasan kegiatan usaha masyarakat yang mampu menciptakan peluang pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

8. Pembangunan **bidang** penanaman modal (investasi) diarahkan pada pengembangan perencanaan investasi melalui Kantor Penanaman Modal Daerah dalam rangka penguatan struktur ekonomi dan struktur wilayah serta peningkatan skala ekonomi. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan memberikan rangsangan bagi investor, baik lokal, regional, nasional maupun multinasional untuk mengembangkan sektor-sektor andalan dan pengelolaan sumberdaya alam
9. Pembangunan **bidang lingkungan** hidup dan Tata Ruang diarahkan sedemikian rupa sehingga potensi lingkungan hidup bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan potensi lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan line hidup didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum nasional, internasional kearifan masyarakat lokal.
10. Pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada penertiban admiministrasi pertanahan melalui upaya sertifikasi tanah sistematis. Sertifikasi tanah sistematis dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selama ini menguasai tanah berdasarkan adat-istiadat setempat. Sertifikasi juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor pemerintah, dan masyarakat yang memerlukan tanah untuk berbagai kebutuhan.
11. Pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dia pada upaya pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan usaha, dan

keterkaitan di antara berbagai tingkat dan golongan usaha, termasuk informal dan tradisional. Upaya lain yang akan dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana usaha, pembinaan dan bimbingan manajemen, penguasaan teknologi, serta bantuan permodalan.

12. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan dan penciptaan lapangan kerja dengan lebih mengedepankan prinsip adaptif terhadap kondisi dan struktur angkatan kerja dan seluruh lapisan masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada pemberdayaan tenaga kerja wanita sebagai mitra sejajar tenaga kerja pria.
13. Pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata seni dan budaya serta pembinaan usaha-usaha jasa pariwisata dan jasa promosi.
14. Pembangunan bidang penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan Kabupaten Selayar dapat menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom. Pembangunan pengembangan kelembagaan pemerintah diupayakan untuk mereposisi fungsi peran pemerintah dari perilaku utama pembangunan menjadi inisiator, fasilitator dan motivator dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain kelembagaan masyarakat akan lebih dikembangkan dan diberdayakan mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah
15. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada pengembangan budaya hukum untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum.
16. Pembangunan **bidang** agama diarahkan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama

sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan kehidupan bermasyarakat, serta terciptanya kerukunan hidup umat beragama.

17. Pembangunan **bidang kedudukan dan peranan wanita** diarahkan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria (kesetaraan gender) dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan terutama penanganan berbagai masalah ekonomi serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

18. Pembangunan bidang pemuda **dan olah raga** diarahkan untuk menumbuhkembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat di bidang penguasaan IPTEK dan keterampilan dengan memberikan kesempatan berkembang secara profesional, kritis, kreatif, inovatif, mandiri dan memiliki semangat kepeloporan serta etos kerja sebagai kader pemimpin masa depan yang tanggap terhadap aspirasi rakyat dan menciptakan iklim budaya olah raga di kalangan masyarakat.

1.4 LEMAHNYA SISTEM PEREKONOMIAN DAERAH

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam membangun sistem perekonomian daerah, belum mampu memperlihatkan adanya dinamika ekonomi yang berorientasi pada kelanggengan usaha ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi antara tahun 1994-1996 dengan tingkat rata-rata 7,23 % pertahun, ternyata runtuh seketika pada tahun 1999 di mana pada saat itu, pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga mencapai 2,14 %. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya

krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997.

Sektor pertanian, yang selama ini mendominasi pembentukan struktur ekonomi masyarakat, juga tidak dapat memberi andil yang lebih banyak dalam upaya pemulihan ekonomi pada tingkat daerah. Walaupun sampai dengan tahun 2000, tenaga kerja yang terserap masuk ke dalam sektor ini, mencapai sekitar 71,08 %. Sementara sektor lain, seperti sektor industri dan perdagangan masing-masing hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 10,26 % dan 5,25 % pada tahun 2000.

Bagi Pemerintah Kabupaten Selayar, langkah yang perlu diambil untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai basis utama dalam pembentukan total produk domestik bruto (PDRB). Sekalipun demikian sektor pertanian tetap akan mendapat perhatian dalam mendukung kebijakan perekonomian daerah.

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan berlaku efektifnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka konstelasi pemerintahan mengandung konsekuensi perlunya aparatur pemerintah yang kuat sehingga keberadaan aparatur pemerintah daerah diharapkan akan mampu memainkan peranan sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, kata kuncinya adalah pada Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan manusia Indonesia.

Oleh karena itu, perlu penegasan bahwa pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menekankan manusia sebagai subjek (pelaku) pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan profesionalisme dan disiplin. Selain itu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maupun kemampuan manajerial. Sedangkan pembangunan manusia sebagai insan merupakan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohani dan kepribadian. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam nilai Iman dan Taqwa (IMTAQ) terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu model, alat ataupun pendekatan yang digunakan untuk menilai/mengukur tingkat kualitas hidup manusia adalah dengan menggunakan *Metode Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Dalam metode IPM digunakan tiga indikator yaitu tingkat pengetahuan, derajat kesehatan dan kesejahteraan (EKONOMI). Tingkat pengetahuan diukur dengan mengamati rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf, derajat kesehatan direpresentasikan dengan angka harapan hidup, sedangkan tingkat kesejahteraan dinyatakan dengan paritas daya beli (*Purchasing power*).

Pada dasarnya penggunaan pendekatan IPM hanya mengukur kualitas fisik semata, oleh karena itu dalam rangka pembangunan manusia secara menyeluruh maka seyogyanya pembangunan manusia juga berlandaskan pada pendekatan non fisik seperti watak, bathin dan spiritual.

Dengan menggunakan pendekatan IPM tersebut diatas, secara umum dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Selayar | dikategorikan masih rendah, sama dengan kualitas SDM hampir seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan yang juga termasuk rendah dibanding propinsi-propinsi Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka agenda pembangunan Indonesia dalam Propeda ini sekurangnya mencakup tiga program utama yang Pertama, Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Kedua, peningkatan pengetahuan dan Ketiga, Program peningkatan kualitas spritual bathiniah masyarakat yang meliputi bidang keagamaan, budaya dan kesenian.

2.2. KONDISI DEWASA INI

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, tercatat bahwa Penduduk Kabupaten Selayar sekitar 103.473 jiwa, yang terdiri dari penduduk sebanyak 48.963 jiwa dan perempuan 54.510 jiwa. Perbandingan penduduk dan perempuan atau Sex Ratio-nya sekitar 91,04 %, yang berarti bahwa set orang penduduk perempuan terdapat sekitar 91 penduduk laki-laki.

Bila dilihat per kecamatan, maka jumlah penduduk yang paling banyak di kecamatan Benteng dengan jumlah penduduk sebanyak 15.974 jiwa. Sec jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pasimarannu dengan penduduk sebanyak 3.964 jiwa. Adapun sex ratio tertinggi terdapat di Kecamatan Pasimasunggu yaitu sekitar 97,32% dan sex ratio terendah terdapat di Kecamatan Bontoharu dengan Sex ratio sebesar 88,26%.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Selayar pada tahun 2000 sekitar 0,2 merupakan laju pertumbuhan penduduk yang tergolong rendah. Laju pertur penduduk tersebut dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan mutasi penduduk.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan terdiri dari jenjang taman kanak (TK) sebanyak 598 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 13.998 orang, d tamatSD 1.749 orang. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMTP 1.117 Selebihnya, penduduk yang termasuk ke dalam kategori tidak pernah be tamatan SMTA, serta tamatan perguruan tinggi yang datanya tidak tercatat.

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Selayar baru sampai pada tingkat SMU. menunjang sektor unggulan daerah berupa pariwisata, maritim, perikanan, per dan perkebunan, perlu diselenggarakan pendidikan-pendidikan kejuruan, tea bidang maritim dan pariwisata. Sampai saat ini fasilitas yang ada adalah 4 buah 27 SLTP, 170 SD, dan32 TK.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

2.3.1. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia yang didorong oleh peningkatan kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan kesehatan jasmaniah dan mental yang dapat menghasilkan sumberdaya manusia/aparat yang bersih dan bebas dari **KKN** sehingga tercapai

pemerintahan yang *Good Governance*.

3. Pemerintahan yang *Good Governance* merupakan manifestasi dari fungsi pelayanan prima pada masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut serta dalam proses pembangunan.

2.3.2. Sasaran

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang dapat diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya jumlah penduduk yang sakit dan tingkat kematian penduduk.
3. Meningkatnya kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang ditandai dengan membaiknya kinerja pemerintahan yang bebas dari Praktik KKN.

2.4. PROGRAM PEMBANGUNAN

2.4.1. Peningkatan Kualitas dan

Pemerataan Pendidikan 2.4.1.1

Masalah dan Tantangan

- * Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai;
- * Ketersediaan dana yang belum mencukupi seluruh kebutuhan aktivitas lembaga pendidikan;
- * Kelangkaan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional dibidangnya;
- * Distribusi tenaga pendidik yang belum merata pada hampir seluruh jenjang pendidikan;
- * Rendahnya kemampuan lembaga pendidikan kejuruan yang menyebabkan luarannya kurang

profesional dan belum siap pakai;

- * Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kemampuan untuk membayar biaya pendidikan.

2.4.1.2 Strategi

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, maupun masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian dan keterpaduan antar berbagai kebijaksanaan dan program yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.
- Memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh pada pengembangan lembaga pendidikan dengan mendorong masyarakat, baik individu, kelompok, badan usaha maupun organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berperan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.

2.4.1.3 Program Indikatif

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- Distribusi dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pada semua wilayah terutama pada tingkat SD dan SLTP;
- Peningkatan kualitas profesionalisme tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan yang diiringi dengan alokasi dana yang mencukupi kebutuhan lembaga pendidikan;
- Peningkatan dukungan dana bagi pembiayaan aktivitas lembaga pendidikan.

2.4.2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

2.4.2.1. Masalah dan Tantangan

- Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan relatif rendahnya indikator-indikator kesehatan.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup yang sehat;
- Masih rendah dan belum meratanya kualitas sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan masyarakat;

- Era otoda menuntut tenaga perencana di bidang kesehatan yang mampu dan handal serta profesional;

2.4.2.2 Strategi

- Meningkatkan dan memantapkan pengelolaan rumah sakit dan puskesmas serta fasilitas kesehatan masyarakat lainnya.
- Membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil.
- Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat khususnya pada generasi muda tentang bahaya narkoba

2.4.2.3 Program Indikatif

- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- Peningkatan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat pada semua wilayah, khususnya daerah terpencil;
- Peningkatan penyuluh pada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.
- Peningkatan kemampuan tenaga perencana kesehatan pada semua tingkat, administrasi pemerintah.

2.4.3. Peningkatan Kemampuan Aparat

2.4.3.1. Masalah dan Tantangan

- Kemampuan SDM Aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama ini masih relatif rendah dan bersifat administratif dan kaku serta sangat bergantung pada petunjuk teknis dari pusat dan propinsi.
- Kreatifitas aparat dalam menciptakan pola dan sistem pelayanan yang kondusif sangat kurang, karena cenderung bersifat vertikal.
- Pelayanan kepada masyarakat yang digunakan oleh aparat pemerintah daerah terkesan satu arah.
- Belum terdapat suatu wadah yang efektif untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik secara dialogis antar aparat dan masyarakat, sehingga ada kesan saling melempar tugas, wewenang dan tanggung jawab.

2.4.3.2 Strategi

- Memberikan kesempatan pada SDM Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri
- Memantapkan peran struktural dan fungsionalnya

SDMAparatur secara seimbang Melaksanakan sistem seleksi dalam rekrutmen ataupun dalam penempatan aparatur secara tepat melalui analisis jabatan

2.4.3.3. Program Indikatif

- Peningkatan kualitas SDM Aparat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dibarengi dengan alokasi dana yang cukup untuk kebutuhan tersebut;
- Mengikutsertakan SDM Aparat dalam pendidikan dan pelatihan fungsional yang lebih beragam dan relevan dengan bidang dan tugas pokoknya;
- Mengembangkan sistem pelayanan terpadu oleh dan untuk semua sektor sebagai wujud dari pelayanan prima dan sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat;

BAB III
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT

3.1 PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah, pembangunan diharapkan akan diprakarsai dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip dasar pendekatan Kemandirian Lokal yang mendefinisikan aktivitas pembangunan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas suatu tatanan yang dilaksanakan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri, di samping bernuansa pada paradigma baru, pemerintah daerah, prinsip-prinsip otonomi dan kebijaksanaan operasional otonom daerah. Peran pemerintah adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu tatanan tidak berdampak negatif atau menimbulkan konflik dengan tatanan lainnya. Malah diharapkan lebih dari itu, pemerintah semestinya mampu menciptakan sinergi dari berbagai kegiatan pembangunan serta diharapkan pula pemerintah mampu mendorong setiap tatanan untuk saling berinteraksi (interkoneksi). Disamping mempersiapkan penataan kerangka kelembagaan Pemda dan penataan kelembagaan lainnya, reformasi manajemen dan menyusun formula manajemen pemerintahan daerah (Struktural dan kultural), pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan daerah yang simultan. Pembangunan kesisteman dan peningkatan kapasitas SDM, seperti perencanaan kebutuhan diklat (baik aparat maupun masyarakat). Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga masyarakat yang dilakukan dan dilaksanakan dengan senantiasa mengacu kepada nilai budaya lokal, nilai spritual dan agama agar lembaga

dimaksud dapat diterima, berkembang dan mengakar di masyarakat sebagai suatu yang dimiliki dan dibutuhkan serta senantiasa didukung oleh Pemerintah Daerah. Tanpa adanya dukungan pemerintah, lembaga-lembaga semacam itu tidak mampu berfungsi secara baik, atau malah tidak berfungsi sama sekali karena pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan sistem nilai atau budaya masyarakat lokal, serta nilai-nilai spritual dan agama.

Tantangan dan keseriusan yang dihadapi baik oleh Kelembagaan Pemerintah maupun Kelembagaan Masyarakat adalah terbentuknya image yang konstruktif dan logis di dalam mencermati dan merespons perkembangan yang tidak hanya dibatasi oleh nuansa dan konsekuensi dari "otonomi Daerah" saja, namun perkembangan global dan berbagai momentum internasional yang telah ada, seperti lahirnya berbagai kesepakatan dan konsensus internasional melalui berbagai Forum, seperti Konvensi Internasional Hukum Laut, Pemberlakuan UNCLOS 1982, serta Refleksi dari Konvensi Internasional Hukum Laut bagi Indonesia yang melahirkan Undang-undang Tahun 1973,

Tentang Landas Kontinen Indonesia, Penetapan Batas ZEE, dan Penetapan Perbatasan Dengan Negara Tetangga. Kesemuanya ini sangat signifikan bagi Kabupaten Selayar yang Wilayahnya secara geografis merupakan wilayah kepulauan.

Dalam lingkup kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, perlu diberi perhatian khusus kepada pemberdayaan perempuan, bukan saja karena selama ini banyak terjadi ketidakadilan jender dalam hampir semua aspek kehidupan, tetapi lebih disebabkan oleh pertimbangan bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan untuk lebih mempercepat proses pencapaian cita-cita pembangunan daerah.

Di samping itu, perhatian kepada pengembangan kelembagaan pemuda semestinya diberi perhatian khusus pula, karena kelembagaan pemuda sangat menentukan upaya peningkatan kualitas peran pemuda sebagai sumberdaya pembangunan di masa depan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

PEMBANGUNAN 3.2.1. Tujuan

- Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga masyarakat yang mampu berperan secara mandiri dalam pelaksanaan misinya pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga upaya-upaya pembangunan dapat diprakarsai dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- Membentuk kelembagaan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan yang mampu berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan, sekaligus sebagai agen pemberdayaan tatanan masyarakat.
- Melakukan reformasi administrasi dengan meningkatkan keteraturan, meningkatkan dan menyempurnakan metoda serta meningkatkan performance (kinerja) bidang pemerintahan.
- Meningkatkan pengetahuan bagi kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat mengenai perkembangan global dan hasil-hasil forum internasional tentang berbagai hal yang memiliki kesesuaian dengan kinerja kelembagaan di Kabupaten Selayar, dan konsekuensinya di dalam era Otonomi

3.2.2. Sasaran Kelembagaan Masyarakat

- Terbangunnya kemampuan masyarakat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah pada seluruh lini.
- Meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat yang akan bermuara pada terciptanya budaya politik

demokratis serta berkembangnya partisipasi

- politik masyarakat.
- Terbentuknya organisasi politik dan kemasyarakatan lainnya yang mampu melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan terselenggaranya proses politik yang demokratis dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan politik, serta sebagai media pengkaderan calon pimpinan daerah.
- Terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan bagi seluruh masyarakat Selayar sehingga dapat memelihara persatuan bangsa dan kesatuan serta keutuhan wilayah.
- Bangkit dan berkembangnya lembaga-lembaga budaya / kesenian tradisional yang didasarkan kepada semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui upaya-upaya pengembangan budaya tradisional yang dilakukan dengan reinterpretasi, revitalisasi, reaktualisasi dan transformasi nilai-nilai dasar.
- Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap berbagai perkembangan global dan hasil-hasil dari "Forum Internasional" yang berkait dengan fokus agenda dan issue-issue bagi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat pada bidang Kelautan, Perairan dan Pariwisata
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peranan Iptek sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi.
- Terwujudnya peran, kedudukan, partisipasi dan kualitas yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam berbagai bidang pembangunan, yang dicerminkan dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga eksekutif, judikatif dan

legislatif serta meningkatnya jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan kerja dan berusaha serta akses terhadap sumberdaya ekonomi.

- Terwujudnya sistem *gender mainstreaming* yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran gender pada seluruh aparat pemerintah.
- Berkembangnya kelembagaan pemuda yang memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas peran pemuda dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Berkembangnya pranata sosial yang mampu melahirkan generasi muda yang memiliki semangat kemandirian, kepeloporan, dan berwawasan luas.
- Berkembangnya organisasi kepemudaan sebagai wahana proses pendewasaan dan peningkatan kemampuan generasi muda untuk beradaptasi dan berprestasi dalam masyarakat.
- Berkembangnya usaha masyarakat dengan skala ekonomi yang lebih luas sebagai akibat dari adanya kemudahan dalam mengakses modal.

3.2.3. Sasaran Kelembagaan Pemerintah

- Terdapatnya pemerintahan yang baik yang ditandai dengan berkembangnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- Terjalinnnya hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Selayar untuk mewujudkan satu kekuatan sosial ekonomi yang tangguh yang mampu meningkatkan harkat dan derajat masyarakat.
- Tertatanya manajemen pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang No.1 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.

25/2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi.

- Berkembangnya kapabilitas dan kompetensi birokrasi pemerintahan daerah serta distribusi kekuasaan yang adil dan merata yang mampu meminimalkan praktek-praktek KKN dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.
- Meningkatnya kemampuan Pemerintahan Daerah dalam upaya pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemberian pelayanan prima bagi segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali.
- Terbangunnya suatu Kelembagaan Pemerintah yang sarat pengetahuan akan perkembangan global dan konsekuensinya bagi daerah, khususnya yang berkenan dengan hasil-hasil forum internasional, seperti Konvensi Internasional Hukum Laut, serta kemampuan untuk mencermati dan merespons dalam nuansa Otonomi bagi upaya mengembangkan potensi Kelautan, perairan dan kepariwisataan

3.3. Program Pembangunan

3.3.1. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Budaya

- Memfasilitasi dan membantu pengembangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, penciptaan dan pemeliharaan kondisi ketertiban dan keamanan serta peningkatan solidaritas sosial.
- Membantu dan memfasilitasi proses akuntansi, reinterpretasi, revitalisasi dan transformasi lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional agar senantiasa] mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
- Mengembangkan budaya bahari untuk memperkuat

teknostruktur masyarakat j yang berbasis bahari agar pengelolaan sumberdaya kelautan dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan.

3.3.2. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

- Menyelenggarakan penyuluhan bagi pengurus-pengurus organisasi kemasyarakatan dalam usaha memelihara stabilitas politik di Kabupaten Selayar serta menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus-pengurus partai politik untuk meningkatkan kapasitas dan wawasannya.
- Memfasilitasi dan mendorong pengembangan organisasi / politik menuju kemandiriannya dalam perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat daerah serta sebagai media pengkaderan calon-calon pimpinan daerah / nasional.
- Meningkatkan intensitas komunikasi antar komponen masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya melalui dialog yang dilaksanakan secara periodik guna mengembangkan komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah.
- Mengembangkan partisipasi politik masyarakat dengan menyusun mekanisme dan aturan operasionalnya dalam mendukung kelancaran artikulasi kepentingan dan tuntutan masyarakat.
- Meningkatkan fungsi organisasi kemasyarakatan sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan.
- Meningkatkan fungsi partai politik baik sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik maupun sebagai sarana pengatur dan pemecahan konflik dalam masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan, yang

diselenggarakan dalam kerangka untuk memelihara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

- Meningkatkan kapabilitas DPRD sebagai mitra lembaga eksekutif dengan memberikan pendalaman, pendidikan dan pelatihan bagi yang memerlukannya melalui kerja sama perguruan tinggi.

3.3.3. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi

- Mendorong perkembangan lembaga ekonomi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan interkoneksi antar pengusaha asal Selayar yang berdomisili/berusaha di berbagai propinsi lain di Indonesia, termasuk di beberapa negara.
- Pengembangan kelembagaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, mutu produksi dan standarisasinya dengan memanfaatkan kemajuan iptek.
- Pengembangan kelembagaan jaringan distribusi dan pemasaran dengan memanfaatkan kemajuan iptek.
- Revitalisasi kelembagaan keuangan tradisional.
- Pembinaan kewirausahaan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada gerakan koperasi.

3.3.4. Pengembangan Kelembagaan Iptek

- Membantu kegiatan-kegiatan lembaga penelitian/pendidikan dalam upayanya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan iptek yang sesuai dan diperlukan bagi pengembangan daerah.
- Membentuk lembaga yang berfungsi untuk merancang kegiatan penelitian yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan daerah, mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan pada berbagai lembaga penelitian, serta untuk mendorong sosialisasi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian.

3.3.5. Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaannya

- Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan HAM.
- Pemanjapan Kelembagaan Perempuan
Program ini menekankan isu-isu peningkatan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan *gender mainstreaming* dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian organisasi perempuan serta terwujudnya hubungan kemitraan yang efektif antar pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat.

3.3.6. Pemberdayaan Pemuda

- Program pemberdayaan pemuda.
Meliputi antara lain upaya-upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi kepemudaan, peningkatan kesempatan pemuda dalam berorganisasi, pendidikan politik bagi generasi muda, pembinaan dan peningkatan kepemimpinan pemuda, peningkatan keunggulan dan penguasaan iptek, pengembangan kemampuan dan potensi pemuda di bidang kewirausahaan, serta perlindungan terhadap bahaya narkoba.
- Program peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Meliputi upaya-upaya antara lain: peningkatan pengetahuan dan Keterampilan agar mampu memprakarsai kegiatan pembangunan di lingkungannya, peningkatan prakarsa pemuda dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dan peningkatan suasana kepemudaan yang lebih sehat, dinamis, dan demokratis.

3.3.7. Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah

- Program Peningkatan aksesibilitas dan pemerintah kewenangan lembaga-lembaga pemerintah.

Meliputi upaya-upaya antara lain: penguatan eksistensi kelembagaan pemerintah dan peningkatan peran lembaga dalam mengekspresikan tanggung jawab dan kewenangannya dalam melakukan kegiatan rutin kesehariannya untuk melakukan pembinaan bagi tumbuh dan berkembangnya kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan tanggung jawabnya bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kemitra sejajar dengan komponen lainnya.

- Program Pembentukan Kelembagaan Advokasi, Fasilitasi, Revitalisasi di dalam jajaran pemerintahan.

Meliputi upaya-upaya antara lain : Pembentukan suatu lembaga khusus untuk melakukan tugas-tugas pemberdayaan, pembinaan, pelayanan dan pengembangan kehidupan kemasyarakatan di daerah serta menjalin kemitraan di antara komponen masyarakat dan pelaku pembangunan yang ada di daerah, maupun di luar daerah.

- Program Kelembagaan Pemerintah di Bidang Kelautan, Perairan dan kepariwisataan.

Meliputi upaya-upaya antara lain : Penguatan kelembagaan pemerintah di bidang kelautan, perairan dan kepariwisataan sebagai wujud memperkuat potensi daerah dan tatanan terwujudnya wilayah bahari yang handal dan terkemuka di tingkat regional dan tingkat nasional

- Program Riset dan Pengembangan Bagi Aparatur Pemerintah

Meliputi upaya-upaya antara lain: peningkatan pengetahuan dan profesionalisme apatur dalam mengembangkan kinerja, interkoneksi antar

dan antara lembaga dalam berinteraksi secara kelembagaan

maupun perseorangan dengan berbagai pihak dan kalangan yang ada di dalam masyarakat.

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kelembagaan Pemerintah

Meliputi upaya-upaya : peningkatan kinerja aparatur, berupa kedisiplinan, tanggung-jawab (akuntabilitas) dan kapabilitas dalam memahami persoalan persoalan yang ada dan kewenangannya menciptakan atmosfir dan etos kerja yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan masyarakat dan golongan. Di samping menjadikan kelembagaan pemerintah merujuk pada terciptanya *clean government dan good governance*.

BAB IV

PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH

4.1 PERIKANAN DAN KELAUTAN

4.1.1. PENDAHULUAN

Kabupaten selayar yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, sebahagian besar wilayahnya belum banyak tersentuh oleh kegiatan pembangunan secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga pemanfaatan potensi wilayah utamanya potensi perikanan dan potensi kelautan belum optimal. Beberapa hal yang mendasari hal diatas yakni *pertama*, Selama ini pembangunan daerah Kabupaten Selayar masih di dominasi oleh arahan dan kepentingan pembangunan skala propinsi dan skala nasional. Adanya penentuan batas dari garis pantai yang akan dikelola oleh propinsi dan nasional, menyebabkan Kabupaten Selayar tidak dapat mengintegrasikan pembangunan wilayahnya secara mandiri. *Kedua*, Kabupaten Selayar yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan besar, menyebabkan sehingga sulit mengintegrasikan pembangunan antara satu pulau dengan pulau lainnya, *Ketiga*, sarana perhubungan antar wilayah pulau, maupun sarana perhubungan dengan daerah -daerah lain, belum cukup memadai sehingga pengelolaan pembangunan kurang optimal, *Empat*, Pembangunan, dengan memanfaatkan potensi laut dan perikanan, merupakan jenis usaha yang memerlukan investasi yang besar, sehingga masih terbatas pengusaha-pengusaha yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Selayar.

Berdasarkan pada hal diatas maka pembangunan Kabupaten Selayar memerlukan program-program pembangunan untuk mengatasi pembangunan ekonomi, utamanya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan. Program-program tersebut diantaranya. pertama, mengupayakan integrasi Kabupaten Selayar sebagai suatu entitas ekonomi, hal

ini dilakukan dengan mengupayakan menjadikan Kabupaten Selayar Sebagai Kabupaten Maritim. Program lainnya adalah mengupayakan pengoptimalan pembangunan infrastruktur perhubungan, utamanya perhubungan antar wilayah di Kabupaten Selayar, maupun perhubungan dengan daerah lainnya, pengembangan agroindustri khususnya pengolahan hasil-hasil perikanan, serta menjadikan kawasan laut Taka Bonerate sebagai kawasan pariwisata yang maju di kawasan Indonesia Timur. Upaya mencapai ke arah itu, pengembangan sektor-sektor lain yang telah dilaksanakan selama ini tetap di pacu, dalam artian pengoptimalan pengelolaan berbagai sumber potensi pendukung pengembangan bidang kemaritiman dilaksanakan secara terintegrasi, bersinergi dan simultan.

4.1.2. KONDISI DEWASAINI

Kabupaten selayar memiliki wilayah laut yang cukup luas, kurang lebih meli | 94,68 persen dari total luas wilayahnya yakni 21.138,41 km². bila dibandingkan den jumlah penduduknya pada tahun 1994, rasionya adalah 39,245 ha laut bagi setiap or penduduk.

Karena letak georafisnya, sumber daya laut merupakan sumber daya strategis bagi kabupaten Selayar, sektor angkutan, khususnya angkutan laut tumbuh sebagai pendukung kekuatan pembangunan daerah ini terutama dalam interaksi kegiatan ekonomi dengan daerah lain.

Bukan hanya dengan fungsinya sebagai media penghubung sehingga dini strategis ,tetapi juga karena kandungan biota didalamnya yang menjadikan sub sektor produksi andalan daerah ini, khususnya bagi penduduk berpredikat nelayan jumlahnya tidak sedikit. Kurang lebih 14,23 persen dari total penduduk kabupaten Selayar atau 3,639 dari 25,540 rumah tangga yang menyandarkan sumber penghidup pada usaha penangkapan ikan di laut.

Ada 41 jenis ikan laut yang umumnya dapat ditangkap

oleh para nelayan beberapa diantaranya merupakan komoditi ikan andalan yang dimaksud antara lain ikan tuna (cakalang.. tongkol), napoleon, tenggiri, layang, kembung, cumi-cumi, kerapu, lobster, kerang-kerangan dan teripang.

Suatu harapan rasional, sumber daya laut Selayar akan menjadi sumber kekuatan utama pembangunan ekonomi daerah ini terutama dalam mengimbangi kejenuhan lahan pada masa yang akan datang. Perikanan laut bukan satu-satunya sektor produk yang dapat dilakukan.. tetapi berbagai macam industri kelautan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui pemberdayaan sumber daya laut. Kegiatan ekonomi digolongkan dalam industri kelautan secara langsung memanfaatkan lingkungan kandungan laut adalah industri pariwisata dan lepas pantai.

Lingkungan laut Kabupaten Selayar memiliki potensi deposit karang yang memberikan peluang besar untuk membuka sektor produksi baru dengan pariwisata sebagai leading sektornya. Wilayah sekitar Taka' Bonerate yang telah ditetapkan sebagai "Taman Nasional" seluas 530.765 ha, seyogyanya telah dikelola menjadi kegiatan ekonomi i Khusus untuk industri lepas pantai, masih diperlukan penelitian eksploratif untuk menemukenali kandungan sumber-sumber energi di dalamnya. Masih dalam lingkup industri kelautan, pengembangan industri perkapalan khususnya galangan kapal rak diperlukan terutama dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi pada sel< perikanan dan angkutan.

4.1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

i) Tujuan

- Meningkatkan Produksi dan produktivitas nelayan melalui peningkatan jumlah dan kualitas armada penangkapan ikan, serta pengembangan budidaya perikanan, sehingga income perkapita dapat ditingkatkan serta dimanfaatkannya wilayah lepas pantai secara optimal sebagai daerah penangkapan.
- Meningkatkan sarana pendukung, khususnya tempat

pendaratan ikan (TPI) dan armada transportasi laut yang memadai untuk distribusi komoditas.

- Meningkatkan keterampilan nelayan, melalui peningkatan pembinaan dan penguatan peran lembaga ekonomi khususnya lembaga perbankan dan koperasi serta mengupayakan terciptanya iklim kemitraan bagi nelayan dengan pengusaha.
- Menjadikan selayar sebagai terminal pemasaran hasil perikanan laut untuk melayani kebutuhan domestik dan ekspor.
- Menggali potensi kelautan (potensi biota laut untuk tujuan wisata dan potensi lainnya) yang disertai upaya konservasi terhadap potensi laut yang strategis, seperti taman laut Taka Bonerate, Ngapalohe, Pasioge dan lain-lain

ii) **Sasaran**

- Meningkatnya income percapita masyarakat nelayan, dan optimalnya pemanfaatan wilayah lepas pantai bagi nelayan yang dapat diukur dari meningkatnya jumlah dan kualitas armada penangkapan.
- Peningkatan dan pengembangan usaha perikanan budidaya, yang terukur dari perluasan areal budidaya dan meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.
- Lancarnya distribusi produksi serta berkurangnya kebocoran hasil kegiatan ekonomi melalui peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan ekonomi khususnya yang berbasis kelautan, seperti TPI dan transportasi laut.
- Meningkatnya produktivitas dan skala usaha nelayan kecil melalui kegiatan pembinaan dan terciptanya iklim kemitraan serta penguatan peran lembaga ekonomi khususnya perbankan dan koperasi.
- Tersedianya industri perikanan dibidang pengolahan, pelayanan jasa dan pemasaran hasil.
- Teridentifikasinya potensi-potensi kelautan hingga tahap

kelayakan, dan mengelola potensi tersebut untuk tujuan kemakmuran masyarakat serta mengupayakan kelestariannya.

4.1.4. PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1.4.1. Peningkatan Produksi Perikanan

a. Masalah dan Tantangan

- Produksi dan produktivitas petani-nelayan masih rendah
- Sistem produksi nelayan tangkap dan petani perikanan budidaya masih bersifat tradisional
- Jumlah dan kualitas armada penangkapan nelayan belum memadai.
- Daerah penangkapan di wilayah lepas pantai belum dimanfaatkan secara optimal
- Luas areal perikanan budidaya masih terbatas
- Struktur permodalan nelayan lemah dan skala usaha masih relatif kecil.
- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan menggunakan alat tangkap dengan fasilitas yang memadai, demikian pula penggunaan teknologi budidaya perikanan
- Lembaga ekonomi perbankan dan koperasi belum banyak menyentuh nelayan kecil
- Fasilitas penunjang seperti sarana transportasi laut dan tempat pendaratan i
- belum memadai
- Posisi strategis selasar sebagai daerah jalur transportasi laut nasional belum
- banyak dimanfaatkan
- Potensi perikanan laut yang besar, belum banyak digarap oleh masyarakat setempat, bahkan masyarakat dari daerah lain yang banyak melakukan penangkapan sehingga kebocoran produksi daerah tidak dapat terhindari.
- Industri perikanan yang menunjang ekspor belum optimal

b. Strategi

- Mendorong terciptanya iklim budaya bahari yang produktif
- Memberikan pelayanan secara cepat dan efektif bagi investor dibidang indust perikanan serta promosi potensi perikanan laut secara berkesinambungan.
- Memfasilitasi tersedianya sarana pendukung bagi pengembangan indust perikanan, utamanya industri pengolahan, pelayanan jasa dan pemasaran hasil.
- Pengembangan jaringan kemitraan dengan pengusaha dan instansi/ lembaga **lainl** baik domestik maupun asing yang memiliki kompetensi dibidang pengembanganj perikanan

c. Program Indikatif

- Pemberdayaan masyarakat petani-nelayan dalam meningkatkan produksi dan produktivitasnya untuk menunjang pendapatan perkapita masyarakat.
- Penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang untuk memperlancar distribusi produksi, pengadaan fasilitas penangkapan dan pemasaran hasil.
- Perluasan areal pengembangan usaha perikanan budidaya
- Menjalin kemitraan dengan pengusaha/instansi/lembaga lain untuk menunjang pengembangan industri perikanan, baik industri pengolahan, pelayanan jasa dan pemasaran hasil perikanan

4.1.4.2. Optimalisasi Pengembangan Potensi Kelautan

a. Masalah dan Tantangan

- Pemanfaatan potensi kelautan belum optimal.
- Masih kurangnya identifikasi potensi kelautan hingga tahap kelayakan
- Eksploitasi terhadap sumberdaya laut strategis yang tidak terkendali dapat
- menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya tersebut.
- Kewenangan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya laut belum utuh, karena sebagian wilayah laut masih terkait dengan kepentingan propinsi dan nasional.

- Potensi laut Selayar yang merupakan pertemuan arus dari beberapa laut besar, memungkinkan memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar dan beragam Selayar merupakan wilayah jalur transportasi laut nasional, namun fasilitas penunjangnya belum memadai.
- Industri kelautan seperti industri wisata dan pelayanan jasa transportasi laut belum optimal.

b. Strategi

- Mengupayakan untuk memperoleh kewenangan secara mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan potensi laut.
- Mendorong dan memfasilitasi terciptanya industri kelautan seperti industri wisata dan pelayanan jasa transportasi laut.
- Mengembangkan jalur transportasi laut

c. Program Indikatif

- Melakukan identifikasi dan pengkajian tentang potensi kelautan hingga tahap studi kelayakan pengembangan.
- Mengembangkan industri pelayanan jasa transportasi laut, seperti mengupayakan
- penambahan armada dan sarana pelabuhan serta mendorong terciptanya industri galangan kapal.
- Mengembangkan keanekaragaman industri wisata laut dan melakukan pemasaran sosial (Promosi) secara kontinu.
- Pelestarian potensi laut strategis seperti Taman wisata Taka Bonerate, Bab Ngapalohe dan lain-lain agar kelestarian tetap terjaga.

4.2. PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

4.2.1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan arahan kebijaksanaan dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Selayar bahwa salah satu strategi dan peluang pembangunan ekonomi ke depan Kabupaten Selayar adalah sektor pariwisata. Sektor Pariwisata akan memegang peranan penting dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya dari segi

peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat tetapi sektor pariwisata juga akan dapat membantu mengatasi masalah tenaga kerja. Selanjutnya sektor ini dapat pula merangsang atau memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Melalui pelaksanaan serangkaian kebijaksanaan selama ini telah ditingkat pembinaan dan pengembangan kepariwisataan seperti meningkatkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk-produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata terutama di sekitar Taman laut Taka Bonerate dan fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan bandar udara. Akan tetapi upaya tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun dari mancanegara untuk berkunjung ke tempat objek wisata di Kabupaten Selayar.

Untuk itu gambaran kondisi objektif dan program pengembangannya sangat diperlukan guna mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi wisata diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Selayar.

4.2.2. KONDISI DEWASA INI

Potensi objek dan daya tank wisata di Kabupaten Selayar sangat besar untuk dikembangkan dalam upaya menarik kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berbagai peluang besar untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Selayar antara lain dengan selesainya dan berfungsi bandar udara yang memenuhi syarat landasan pacu Fokker 28 dan CN250 di Pac Selayar, pelabuhan fery Pamatata dan pelabuhan alam di daerah Pattumbukang bagian selatan pulau Selayar. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan kondisi objek potensi pariwisata termasuk fasilitas pendukungnya, yaitu:

4.2.2.1 Potensi Obyek Wisata.

Sesuai Buku Tiga tentang Prospek dan Kerangka Umum Pembangunan Ekonomi Regional Kabupaten Selayar bahwa ada beberapa obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu:

a. Pariwisata Alam, yang terdiri atas:

1) Taman Nasional Laut Taka Bonerate.

"Taman Nasional Laut Taka Bonerate" dengan segala keindahan serta potensi karang dan biota laut yang sangat indah dan di dalamnya memiliki keunggulan kompetitif yang sulit didapatsaingannya di dunia.

2). Lingkungan Alam Bontomarannu yang berada pada daerah Ketinggian dengan daya tarik keindahan alamnya.

3) Pantai Pasir Putih dan Gua di Appa'tana, Pattumbukang, Baloiya, Je'neiya, Babaere, Ngapalohe, Talloiya, Suttia dan lain-lain.

b. Pariwisata Budaya dan Sejarah, yang terdiri atas:

1) Gong Nekara

Salah satu objek wisata kebudayaan dan memiliki nilai historis yang sangat menarik adalah "Gong Nekara" di Matalalang, mesjid tua yang menunjukkan sebuah sejarah peradaban manusia di Kabupaten Selayar.

2) Jangkar Raksasa

Jangkar Raksasa terdapat di Padang Selayar yang menunjukkan bahwa daerah **ini** pernah disinggahi oleh kapal-kapal besar dari berbagai penjuru dunia dan sekarang ini bisa menjadi objek wisata yang diminati oleh wisatawan loka dan mancanegara.

4.2.2.2 Fasilitas Pendukung.

Fasilitas pendukung yang dapat dikemukakan di sini adalah masalah perhotelan yang dianggap sangat terkait dengan pengembangan kepariwisataan. Jumlah hotel di Kabupaten

Selayar sebanyak 4 buah dengan 57 kamar dan 112 tempat tidur. Nama, jumlah kamar, tempat tidur dan alamat hotel, sbb:

- 1) Hotel Berlian, terdiri atas 19 kamar dan 34 tempat tidur terletak di Jalan Jenderal Sudirman, telp. 21219.
- 2) Hotel Pantai Selayar, terdiri atas 18 kamar dan 48 tempat tidur di Jalan Sukarno Hatta, Telp. 21295.
- 3) Wisma Mesjid Raya, terdiri atas 10 kamar, 20 tempat tidur di Jalan R. A. Kartini.
- 4) Mess Pemda, terdiri atas 10 kamar, 20 tempat tidur di Jalan Jend.Sudirman, Tepl.21543.

4.2.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.2.3.1. Tujuan

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam mewujudkan pariwisata yang tangguh dan perdagangan yang maju demi terwujudnya stri ekonomi daerah dan masyarakat yang kuat.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dalam penataan dan pelayanan pengelolaan objek wisata.
- 3) Mengembangkan agrowisata dan fasilitas pendukung untuk menarik wisata baik domestik maupun mancanegara.
- 4) Meningkatkan promosi pemasaran objek wisata dan informasi baik melalui kemitraan pemerintah maupun swasta dan media cetak/elektronika.

4.2.3.2. Sasaran

- 1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat yang ditandai den peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM pariwisata yang ditandai dengan peningkatan pelayanan,

- 3) Terciptanya banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang merata
tumbuhnya iklim yang kondusif.
- 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata baik langsung maupun tidak langsung bagi pengembangan sektor pariwisata.
- 5) Meningkatnya pola kemitraan yang sinergis antar pemerintah, swasta, masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata.

4.2.4. PROGRAM PEMBANGUNAN

4.2.4.1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk

Aksesibilitas

a. Masalah dan Tantangan

- Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat dengan daerah tujuan wisata, sehingga arus wisatawan relatif rendah.
- Terbatasnya fasilitas pelayanan akomodasi dan telekomunikasi di daerah tujuan wisata.
- Kurangnya kegiatan promosi wisata keluar daerah dan manca negara.
- Terbatasnya usaha-usaha jasa pariwisata seperti penginapan, rumah makan, restoran.
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam program pengembangan objek wisata.

b. Strategi

- Memberikan dukungan sepenuhnya pada masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam bidang kepariwisataan, misalnya dengan mempermudah proses perijinan.
- Memperlancar transportasi darat, laut dan udara khususnya ke dan dari ODTW
- Koordinasi lintas sektoral terus diupayakan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata

yang berkelanjutan

c. Program Indikatif

- Penataan dan pengembangan ODTW sekaligus paket atraksi kesenian dan budaya Pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran transportasi darat, laut dan udara serta tempat penginapan/hotel yang bertaraf internasional.
- Pengembangan pusat informasi dan promosi pariwisata yang memiliki akses dengan berbagai pusat informasi dengan memanfaatkan jaringan internet.

4.2.4.2. Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisata

a. Masalah Dan Tantangan

- Masyarakat pada umumnya belum memahami arti dan makna pariwisata secara luas, sehingga tak berfungsi dengan baik
- Sumber daya manusia dalam bidang usaha pariwisata belum memadai baik
- kuantitas maupun kualitas.
- Kemampuan teknis dan manajerial aparat pengelola dalam menata, memelihara dan mengembangkan obyek dan fasilitas pelayanan pariwisata, seni dan budaya masih rendah.
- Belum ada pemandu wisata laut yang terlatih

b. Strategi

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola industri pariwisata
- Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan melalui penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan dan upaya lainnya.

c. Program Indikatif

- Melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM agar menjadi tenaga kerja yang profesional dalam mengelola objek wisata.
- Kampanye sadar wisata dalam rangka pembudayaan sadar

wisata pada seluruh lapisan masyarakat

4.2.4.3. Pelibatan Swasta/Investor Dalam Kegiatan Kepariwisataaan

a. Masalah Dan Tantangan

- Masih terbatasnya promosi dan pemasaran paket wisata ke objek wisata potensial baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Minat investor dalam bidang kepariwisataan belum serius untuk menanar
- modalnya khususnya dalam tahapan penjajakan.
- Belum adanya lembaga kepariwisataan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang dijalankan secara profesional.

b. Strategi

- Melaksanakan kegiatan promosi pariwisata yang memancing citra kepariwisataan kabupaten Selayar baik di dalam negeri maupun di luar melalui mass media cetak maupun elektronik
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan industri kepariwisataan yang mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkat kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru.

c. Program Indikatif

- Peningkatan keamanan dan ketertiban pada berbagai objek wisata. Penyediaan produk hukum di bidang kepariwisataan khususnya yang berkait dengan hak dan kewajiban dalam pengelolaan potensi wisata.
- Intensifikasi Usaha Promosi dan pemasaran wisata baik di dalam negeri maupun i luar negeri

4.3. PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

(TANAMAN PANGAN, PERKEBUN/ PETERNAKAN DAN KEHUTANAN).

4.3.1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan arahan kebijaksanaan di dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Selayar, bahwa strategi dan peluang pembangunan ekonomi Selayar depan adalah di bidang kelautan, dengan 2 (dua) sektor unggulan yakni perikanan dan pariwisata. Berdasarkan arahan kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, maka sektor-sektor lain direncanakan dan diarahkan untuk semaksimal mungkin mendukung percepatan pengembangan sektor perikanan dan pariwisata.

Sektor pertanian sebagai sektor pendukung terhadap optimalisasi pengembangan bidang kelautan tetap memperoleh perhatian di dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Selayar ke depan, dengan berbagai hal yang mendasar, yakni : Pertama, Sampai dengan saat ini, sektor pertanian masih penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Selayar (41,99 %), disamping menyerap tenaga kerja terbesar yaitu (71,08) dari jumlah penduduk yang bekerja; Kedua, Komoditi hasil pertanian Selayar telah dikelola secara turun temurun oleh masyarakat dan telah memiliki ciri khas dan pangsa pasar tersendiri terutama tanaman jeruk keprok, kelapa dalam; Ketiga, Produksi pertanian, khususnya sub sektor perkebunan telah terbukti mampu mengatasi dan menghadapi krisis ekonomi dan moneter, yang terjadi pada tahun 1998; Keempat. Upaya transformasi budaya dari budaya masyarakat agraris/kontinen ke budaya masyarakat bahari tidak serta merta dapat diwujudkan, dalam artian baik pada masa transisi, maupun pada saat sektor perikanan dan pariwisata telah menjadi sektor andalan pembangunan Selayar, tetapi pada saat yang sama diharapkan sektor pertanian tetap menjadi pendukung utama pengembangan kedua sektor dimaksud.

4.3.2. KONDISI DEWASA INI

Sebagaimana pemaparan di dalam pembahasan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Selayar, menyatakan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Selayar seluas 546.765 Ha, yang

terdiri dari hutan lindung 8.750 Ha, hutan produksi seluas 5.750 Ha, hutan konversi 1.500 Ha dan suaka alam/wisata/PPA seluas 530.765 Ha. Di daerah ini juga terdapat lahan kering seluas 25.601 Ha, yang sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan. Hutan lindung terdapat di Kecamatan Pasimasunggu dan hutan produksi berada di Kecamatan Bontosikuyu. Pemanfaatan hutan yang kurang terkendali serta penebangan liar dan tidak bertanggung jawab berdampak semakin berkembangnya luas lahan kritis serta semakin berkurangnya kapasitas (debit) air pada beberapa sumber mata air yang ada.

Tanaman perkebunan di Kabupaten Selayar menempati areal seluas 25.352 Ha, yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan, dengan bermacam-macam jenis tanaman seperti kelapa, kemiri, kenari, jambu mete, cengkeh, vanili, kapok, kakao, lada, kopi dll tanaman kelapa yang dikelola secara turun temurun oleh masyarakat Selayar, menempati areal seluas 16.814 Ha, dengan produksi setiap tahun rata-rata sekitar 20.00 ton, jambu mete luas lahan 2.918 Ha, dan produksi 1.296 ton (tahun 2000), tanaman kenari menempati lahan seluas 200 Ha, dan produksi 86 ton, kemiri luas lahan 1.646 Ha, dan produksi 710 ton, cengkeh luas lahan 738 Ha, dan produksi 148 ton. Tanaman vanili yang baru dikembangkan di Kabupaten Selayar sekitar tahun 1979/1998, pada tahun 2002 telah mencapai luas lahan sekitar 230 Ha, dan produksi 61 ton.

Untuk jenis usaha pertanian tanaman pangan di Kabupaten Selayar data t.a 2002 menunjukkan luas lareal yang dikelola sekitar 410.963 Ha, yang terdiri dari 1 persawahan seluas 1.321 Ha, tanah pertanian jagung, umbi-umbian, dan kaca kacang seluas 14.737 Ha, dan untuk buah-buahan termasuk jeruk seluas 394.9051 Perlu dijelaskan bahwa pola pertanian di Selayar umumnya tanaman tumpang sari dengan demikian lahan perkebunan, pada musim-musim tertentu juga

ditanami tanaman pangan yang berjangka pendek. Hasil-hasil pertanian tanaman pangan di Selayar menurut data statistik pertanian tahun 2000, yaitu: jagung sebanyak 20.039, ton, ubi kayu dan ubi jalar 12.638,76 ton, kacang-kacangan 2.321,97 ton jeruk keprok 573,03 ton, jeruk nipis 1.023,30 ton, mangga 1.281,98 ton, dan pisang sebanyak 466,59 ton.

Usaha kegiatan peternakan di Selayar umumnya masih merupakan sambilan dari masyarakat setempat dengan cara-cara tradisional, dan beli merupakan usaha pokok. Jenis-jenis ternak yang berkembang cukup baik di Selayar adalah kambing dengan populasi 102.598 ekor (tahun 2000), selanjutnya kerbau sebanyak 7.413 ekor, sapi 5.785 ekor, kuda 3.894 ekor dan unggas dengan jumlah populasi 251.759 ekor.

4.3.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

i) Tujuan.

- Meningkatkan produksi dan produktivitas petani melalui peningkatan pengembangan secara simultan dan serasi aspek produksi, faktor produk pemasaran, dan kelembagaan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, untuk memacu pengembang sektor pertanian dan kehutanan;
- Meningkatkan keterampilan petani, melalui peningkatan dan penguatan lembaga ekonomi, termasuk lembaga perbankan dan koperasi serta memfasilitasi terciptanya iklim kemitraan bagi petani dengan pengusaha.;
- Meningkatkan produksi hortikultura untuk berkembangnya agroindustri dan agrowisata;
- Meningkatkan mutu dan produktivitas sumber daya hutan, mengurangi degradasi dan berkembangnya upaya rehabilitasi, perlindungan serta konservasi sumber daya hutan;
- Meningkatkan produksi, kualitas, keragaman, dan kemudahan dalam pengelolaan bahan pangan sebagai

kebutuhan pokok untuk ketahanan pangan;

ii) Sasaran.

- Meningkatnya income perkapita masyarakat petani, dan optimalnya pemanfaatan lahan, yang dapat diukur dari meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta semakin berkurangnya lahan pertanian masyarakat yang tidak dikelola;
- Meningkatnya dan berkembangnya kualitas dan produksi hortikultura yang dilihat dari meningkatnya industri rumah tangga dan agrowisata;
- Berkembangnya sistem pengendalian dan pengawasan kehutanan yang ditandai dengan semakin menurunnya pengrusakan hutan secara tidak bertanggung jawab, dan berkurangnya lahan kritis;
- Berkembangnya produksi makanan pokok dan makanan alternatif melalui pemanfaatan sumber pangan lokal.

4.3.4. PROGRAM PEMBANGUNAN

4.3.4.1. Peningkatan Produksi Pertanian.

a. Masalah dan Tantangan

- Produksi dan produktivitas petani masih rendah;
- Penerapan teknologi pada usaha-usaha pertanian masih terbatas;
- Kurangnya minat para generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian;
- Belum berkembangnya kualitas kelembagaan petani;
- infrastruktur pengairan belum mendukung pengembangan sub sektor pertanian dan tanaman pangan;

b. Strategi.

- Memberikan pelayanan secara cepat dan efektif terhadap investor pada pengembangan sektor pertanian;
- Pengembangan ketersediaan sarana pendukung sektor pertanian;
- Memfasilitasi para petani untuk memperoleh

- permodalan dan penggunaan teknologi pertanian;
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian;
 - Mengembangkan kualitas kelembagaan petani.

c. Program Indikatif.

- Penyediaan fasilitas penunjang untuk memperlancar usaha pertanian dan distribusi produksi;
- Pemberdayaan petani dan generasi muda di bidang peningkatan SDM dan akses permodalan;
- Memfasilitasi pengembangan kualitas kelembagaan petani;
- Menjalinkan kemitraan dengan pengusaha/instansi /lembaga lain untuk pengembangan usaha agroindustri dan agrowisata.

4.3.4.2. Peningkatan Ketahanan Pangan.

a. Masalah dan Tantangan

- Masih rendahnya produksi bahan pangan pokok;
- Menurunnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan lokal;
- Belum berkembangnya industri produk olahan pangan;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat (produsen dan konsumen) terhadap program ketahanan pangan;
- Masih lemahnya koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan;

b. Strategi

- Memberikan fasilitas bantuan permodalan untuk penyediaan bibit, pemberantasan hama penyakit, dan pengolahan hasil untuk menunjang ketahanan pangan;
- Mengembangkan kualitas keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- Meningkatkan dan mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan untuk peningkatan program ketahanan pangan;
- Memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan lokal, untuk pengembari sumber makanan alternatif;

c. Program Indikatif.

- Peningkatan produksi bahan pangan pokok beras, karbohidrat non beras, sur
- protein, dan lemak;
- Penyediaan sumber makanan alternatif dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;
- Mengembangkan koordinasi dan pemahaman masyarakat untuk ketahanan pangan;

4.3.4.3. Program

Pengembangan Agribisnis

a. Masalah dan Tantangan

- Usaha agribisnis belum dikelola secara profesional;
- Produk agribisnis pada saat panen raya mengalami kendala pemasaran;
- Belum berkembangnya kemitraan usaha agribisnis;
- Masih terbatasnya tenaga aparat pemerintah dalam pelayanan pengembangan agribisnis;
- Belum berkembangnya lembaga permodalan agribisnis dan pedesaan;

b. Strategi

- Memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis melalui penyediaan informasi komoditas dan peta investasi agribisnis;
- Melakukan pengembangan dan penyediaan benih terakreditasi dan penggunaan benih bersertifikat;
- Menciptakan dan menerapkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan;
- Mendorong tumbuh kembangnya kemitraan usaha bisnis;
- Meningkatkan pemasaran produk agribisnis melalui penyediaan informasi pasar, market intelligence, dan promosi pasar;
- Memperkuat kelembagaan pelaku agribisnis terutama petani dalam usaha agribisnis;

c. Program Indikatif.

- Pengembangan usaha agribisnis melalui penyediaan informasi komoditas dan peta investasi agribisnis;
- Peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah untuk pengembangan agribisnis;
- Peningkatan kemitraan usaha dan pemasaran produk agribisnis;
- Peningkatan fasilitas permodalan untuk perluasan lahan, dan pengadaan bibit serta obat-obatan;

4.3.4.4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan.

a. Masalah dan Tantangan.

- Penebangan kayu yang tidak terkendali serta pengusahaan lahan pada kawasan rawan erosi yang mengabaikan usaha konservasi;
- Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan ekosistem lingkungan;

b. Strategi

- Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum dalam pengusahaan hutan dan lahan;
- Mengadakan penyusunan Peraturan Daerah menyangkut pengelolaan dan
- pengawasan hutan;
- Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pengembangan hutan kemasyarakatan;

3. Program Indikatif

- Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan kehutanan; Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kemasyarakatan;
- Pengembangan usaha rehabilitasi dan konservasi hutan; Pengembangan usaha pelestarian sumber mata air.

BABV KAJDAH PELAKSANAAN

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Selayar yang merupakan penjabaran dari Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002-2006, berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Selayar. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Selayar dalam menjalankan tugas di daerahnya berkewajiban mengkoordinasikan dan mengarahkan segenap potensi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang mengacu kepada Propeda Kabupaten Selayar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berwenang mengawasi pelaksanaan Propeda Kabupaten Selayar Tahun 1999-2004.
3. Setiap instansi pemerintah daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Selayar diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran lanjut dari Propeda, sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing instansi.
4. Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Kabupaten Selayar ~~dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah~~ (RAPBD) dirumuskan oleh masing-masing instansi dengan mengacu kepada Renstra dan dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Selayar. Repeta dan RAPBD ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Selayar.